

**RANHIR
RENCANA**

**S
T
R
A
T
E
G
I
S**

RENSTRA

**DINAS
PERHUBUNGAN**

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**



 (0742) 7351069

 dishub.ktl@gmail.com

 www.dishub.tanjabarkab.go.id



KATA PENGANTAR

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renstra ini disusun sebagai upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dalam pencapaian indikator kinerja. Selain itu untuk mengevaluasi pelaksanaan Renstra selama kurun waktu 2021-2026 dan memberikan penajaman dalam pelaksanaan Renstra khususnya tahun 2021 - 2026. Hal dimaksud dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis, baik eksternal maupun kondisi internal.

Sebagai dokumen perencanaan bidang transportasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Renstra ini menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2021 dan 2026.

Demikian dokumen Renstra ini kami sampaikan semoga dapat diterima, dilaksanakan dan mendapat tanggapan yang positif dari semua pihak

Kuala Tungkal, Agustus 2021
Penanggung Jawab
Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
2.2 URAIAN TUGAS	8
2.3 SUMBER DAYA SKPD	17
2.4 KINERJA PELAYANAN	19
2.5 TANTANGAN DAN PELUANG SKPD	20
BAB III. STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI (PM)	22
3.3 TELAAHAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	23
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	24
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	24



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN	26
------------------------	----

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
---------------------------------	----

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN	36
6.2 INDIKATOR KINERJA	36
6.3 KELOMPOK SASARAN	37
6.4 PENDANAAN INDIKATIF	37

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

7.1 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	42
7.2 INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	42

BAB VII. PENUTUP	44
-------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	17
TABEL 2.2 ASSET PENDUKUNG KEGIATAN PELAYANAN DAN OPERASIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	18
TABEL 3.1 TELAAHAN TATA RUANG WILAYAH	24
TABEL 4.1 VISI MISI TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	27
TABEL 4.2 MATRIKS RELEVANSI RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP VISI & MISI RPJMD	32
TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	38
TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	43



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Perhubungan.

Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan diharapkan mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber



daya daerah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan regional dan global.

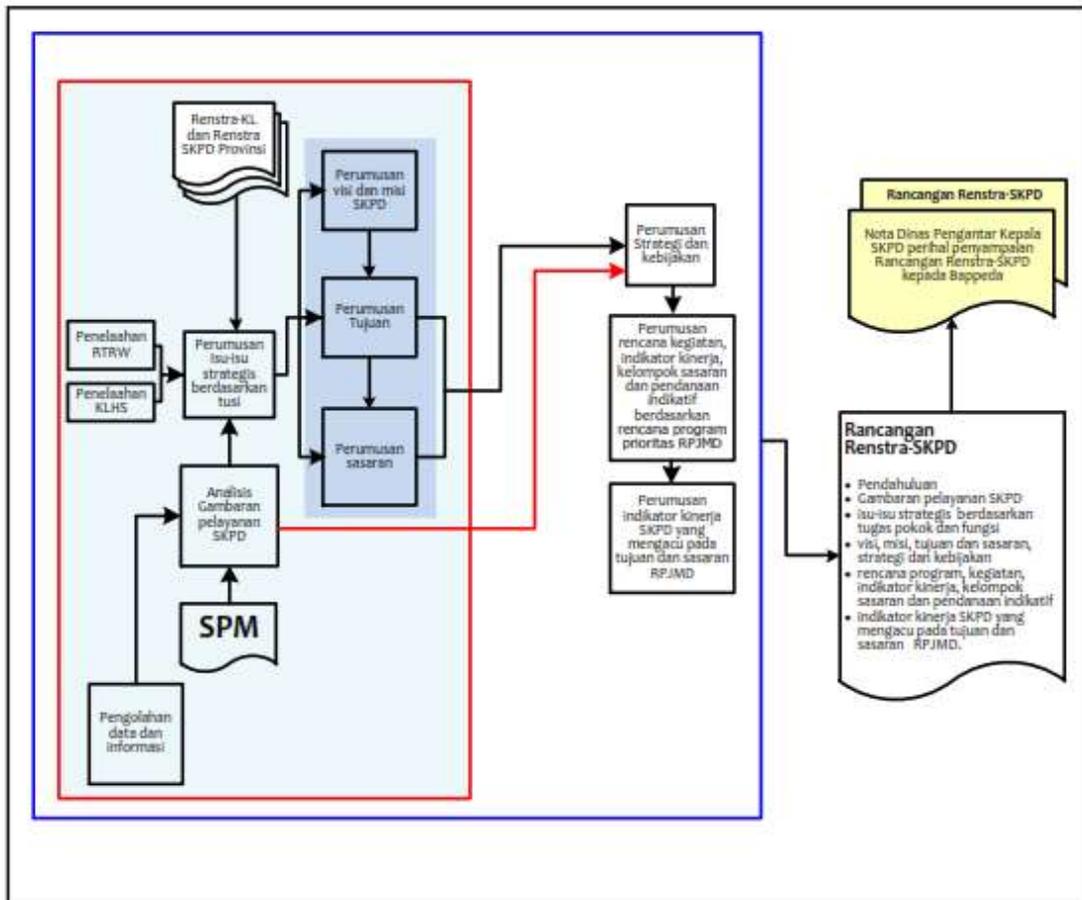
Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2022 - 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu dokumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berikut flowchat tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat :



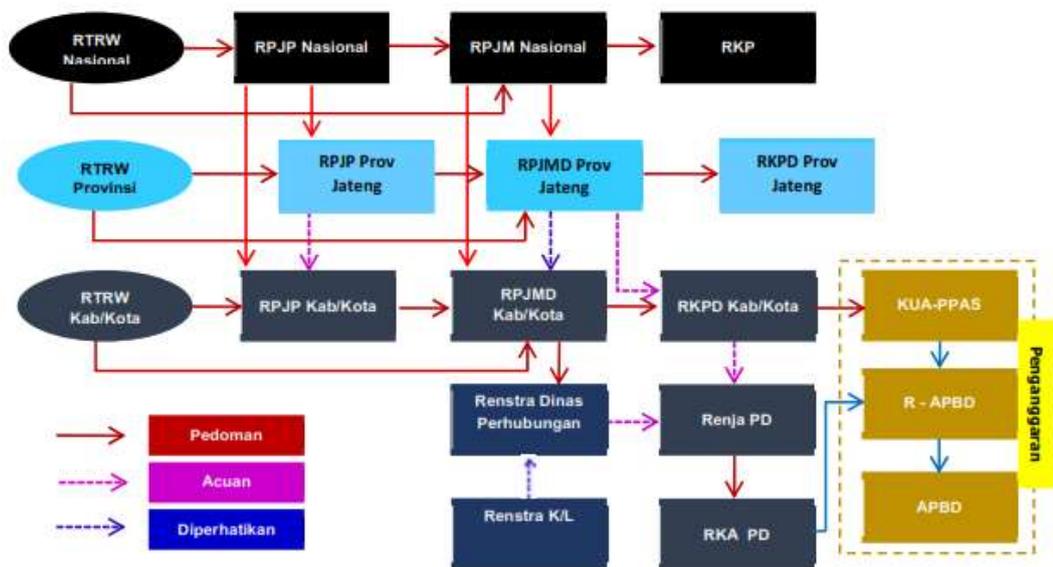
GAMBAR 1.1 Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas



RPJMD disusun berisi indikasi program Pemerintah Daerah selama lima 5 (lima) tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Dalam tahun berjalan pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah hasil evaluasi Rencana Strategis periode lima tahun sebelumnya dan telaah RTRW.



Gambar I.2. Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun melalui dasar :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional;



- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencanan pembangunan jangka pajang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencanan pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.



- j. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Kepentingan Sendiri;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :



1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan dan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. Tujuan :

1. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu menetapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi – misi Kepala Daerah untuk mewujudkan target yang diinginkan priode 5 (lima) tahun mendatang.
3. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal pada tahun 2016 – 2021.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS OPD

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan R.I, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, telaahan Rencana Tata



Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten



Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan rencana tindak lanjut.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Perhubungan.

A. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan di bidang perhubungan darat dan bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan darat dan perhubungan sungai danau dan penyeberangan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan darat dan perhubungan laut sungai danau dan penyeberangan;
- d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang perhubungan darat dan bidang perhubungan laut sungai danau dan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.



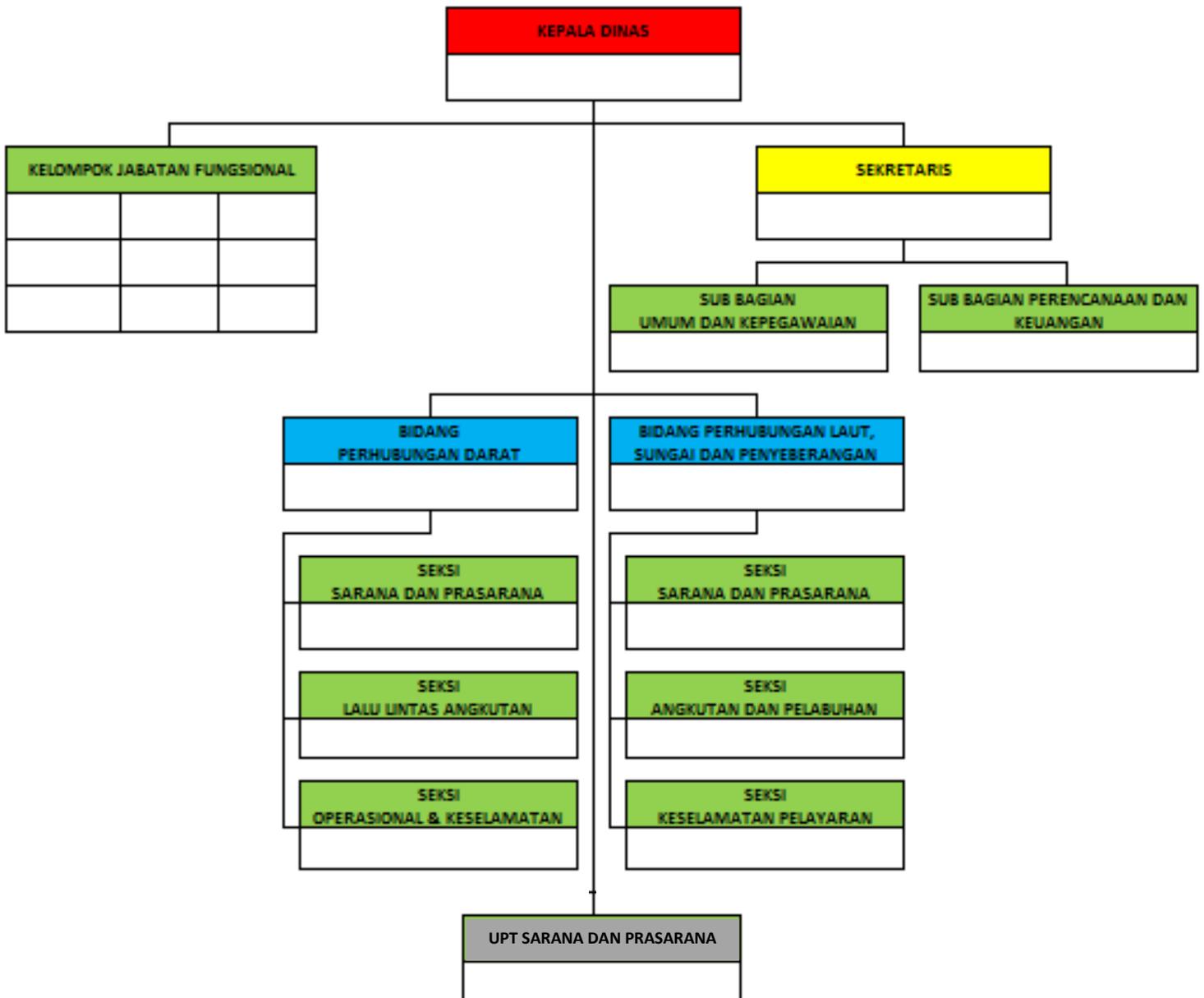
Susunan organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris; yang membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Perhubungan Darat; yang membawahi :
 - Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat
 - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Seksi Operasi dan Keselamatan
4. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan; yang membawahi :
 - Seksi Sarana dan Prasarana Laut, Sungai dan Penyeberangan
 - Seksi Angkutan dan Kepelabuhan
 - Seksi Keselamatan Pelayaran



STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT





B. Uraian Tugas

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

1) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat memiliki fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kesepakatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan penendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);



- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatusahaan, peraturan perundang – undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penebitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan asset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3) SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugasnya, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program memiliki fungsi :



- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melkaukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukakn penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang – bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU_ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4) BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Bidang perhubungan darat memiliki tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, dan rosedur, bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan



penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perhubungan darat memiliki fungsi :

- a. Penyusunan pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perhubungan darat;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD lingkup perhubungan darat; dan



- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan teknis, menyusun rekomendasi, persyaratan, penetapan lokasi, pengadaan, pemeliharaan, pemasangan perlengkapan jalan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakanteknis sarana dan prasarana perhubungan darat;
- c. melakukan penyiapan penetapan lokasi terminal dan persyaratan pengesahan pengoperasian terminal penumpang tipe c, bahan persyaratan pengesahan pembangunan terminal angkutan barang, serta proses pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe c;
- d. melakukan penyusunan bahan rekomendasi penetapankelas jalan dan jaringan jalan kabupaten;
- e. melakukan penyiapan rencana penetapan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,



marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;

- f. melakukan penyiapan rencana penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten, dan rekomendasi persyaratan perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir umum;
- g. melakukan penyiapan rekomendasi perizinan usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan perbengkelan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

6) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penetapan kawasan, rencana induk jaringan LLAJ, jaringan trayek, jaringan lintas, pemberian rekomendasi, fasilitasi penyediaan angkutan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;



- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. melakukan penyiapan bahan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan dalam kabupaten, penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten, dan penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan/pedesaan;
- d. melakukan fasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
- e. melakukan penyiapan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan/pedesaan, rekomendasi izin trayek angkutan umum, AKDP dan AKAP, dan rekomendasi izin penggunaan jalan umum selain untuk kepentingan lalu lintas;
- f. melakukan penyiapan rekomendasi penetapan rencana induk perkeretaapian dalam wilayah Daerah, rekomendasi penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya terletak di dalam wilayah Daerah dan rekomendasi penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah serta rekomendasi penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian yang jaringannya dalam wilayah Daerah;



- g. melakukan penyiapan persyaratan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasanterkait dengan tugasnya.

7) Seksi Operasi dan Keselamatan

Seksi Operasi dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pencegahan, pengujian, rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup operasi dan keselamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Operasi dan Keselamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor, izin usaha angkutan pariwisata, angkutan barang dan angkutan khusus serta izin trayek angkutan kota/pedesaan;
- c. melakukan penyiapan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dan data analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), bahan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;



- d. melakukan pembinaan dan pengawasan lalu lintas, penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian berkala (keur) kendaraan bermotor dan penertiban serta penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas angkutan jalan;
- e. melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan Daerah;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta pemanduan rute untuk pejabat dan/atau tamu daerah;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

8) BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan pelabuhan sungai dan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan penyeberangan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;
- c. penetapan standar batas maksimum sertifikasi (kelaikan kapal laik berlayar);
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPT lingkup perhubungan laut, sungai dan penyeberangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

9) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan



Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, melaksanakan pemeriksaan, pelaporan, koordinasi, pemeliharaan, pengawasan, pemberian rekomendasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana perhubungan laut sungai dan penyeberangan.

Dalam melaksanakannya, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut Sungai dan Penyeberangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pengukuran, pemeriksaan terhadap konstruksi dan permesinan kapal;
- c. melakukan penyiapan rekomendasi penetapan izin lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan, baha pertimbangan teknis penambahan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan sungai dan menyiapkan rancang bangun fasilitas pelabuhan sungai lokal;
- d. melakukan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) perusahaan angkutan laut dan sungai dan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner);
- e. melakukan koordinasi, pemeliharaan dan pengawasan untuk penetapan pemasangan rambu-rambu;



- f. melakukan penyusunan dan menetapkan rencana umum jaringan trayek angkutan sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;
- g. melakukan penyiapan rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan, dan rencana pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai, dan memberikan rekomendasi teknis kegiatan salvage, dan Pekerjaan Bawah Air (PBA);
- h. melakukan pemetaan alur sungai kebutuhan transportasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

10) Seksi Angkutan dan Kepelabuhan

Seksi Angkutan dan Kepelabuhan mempunyai tugas merekomendasikan izin usaha, izin trayek, izin pembangunan dan pengoperasian, izin pengembangan dan pengerukan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup angkutan dan kepelabuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Angkutan dan Kepelabuhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. merekomendasikan izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat orang perorangan atau badan usaha;



- c. merekomendasikan izin usaha penyelenggaraa angkutan sungai dan penyeberangan orang perseorangan atau badan usaha;
- d. merekomendasikan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan serta izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
- e. merekomendasikan/izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan penyeberangan, merekomendasikan izin usaha badan usaha pelabuhan pada pelabuhan pengumpul lokal;
- f. merekomendasikan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- g. merekomendasikan izin pengembangan pelabuhan dan izin pengoperasian pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- h. merekomendasikan penerbitan izin pekerjaan pengerukan dan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- i. merekomendasikan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- j. melakukan pelayanan rekomendasi/pemberian izin usaha pelayaran rakyat (Pelra), bongkar muat angkutan barang khusus dan barang berbahaya, ekspedisi, angkutan sungai;



- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkat dengan tugasnya.

11) Seksi Keselamatan Pelayaran

Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, memberikan rekomendasi lintas penyeberangan, pengoperasian kapal, pengamanan, penertiban, penegakan hukum, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup keselamatan pelayaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. merekomendasikan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api;
- c. melakukan pengamanan, penertiban, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sungai;
- d. melakukan pelayanan surat persetujuan berlayar dan pas perairan daratan kapal, melakukan pemeriksaan perlengkapan navigasi kapal dan melakukan pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;



- e. melakukan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pas kecil, pencatatan kapal dalam buku register pas kecil dan dokumen pengawakan kapal di bawah GT 7 (<GT7);
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan TKK yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) PNS dan 90 (Sembilan Puluh) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RENSTRA (2021-2026)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon : - Eselon II - Eselon III - Eselon IV -Non Eselon Jumlah	 1 3 11 16 31	 1 3 10 13 7	 - - 1 3 4
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan : - SD - SMP - SMA - D II - D III - D IV - S.1 - S.2 Jumlah	 1 1 12 1 2 0 12 2 31	 1 1 11 1 1 0 10 2 27	 0 0 1 0 1 0 2 0 4
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status : - PNS - Kontrak	 31 90	 27 81	 4 9
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur :	 0	 0	 0



- Diklat PIM II	1	1	0
- Diklat PIM III	3	3	0
- Diklat PIM IV			

2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Adapun asset yang mendukung kegiatan pelayanan dan operasional pada yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Aset Pendukung Kegiatan Pelayanan Dan Operasional
Pada Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat**

No	Jenis Asset	Jumlah	Ket
1.	Prasarana		
	a. Gedung kantor Dishub	1 unit	
	b. Gedung hanggar bongkar muat barang	1 unit	
	c. Terminal Kota	2 unit	
	d. Gedung UPT Sarana dan Prasarana	1 unit	
	e. Gedung Pos pengujian kendaraan bermotor	1 unit	
	f. Pos pengawasan di dermaga	1 unit	
	- Dermaga LLASDP	1 unit	
	- Dermaga tangga raja ulu	1 unit	
	- Dermaga ampera	1 unit	
	- Dermaga kuatik	18 unit	
	g. Halte sungai		
2.	Sarana	1 unit	



	a. Kendaraan operasional kepala dinas	2 unit	
	b. Kendaraan operasional LLAJ	3 unit	
	c. Kendaraan operasional bus sekolah	21 unit	
	f. Kendaraan operasional dinas roda dua	1 unit	
	g. Kendaraan operasional roda tiga	1 unit	
	g. Kendaraan operasional air (speedboat)		
3.	Fasilitas Keselamatan Transportasi		
	a. Rambu darat	433 unit	
	b. Rambu type F	8 unit	
	c. Rambu Mini	15 unit	
	d. RPJJ (Rambu petunjuk jalan darat)	17 unit	
	e. Pagar temporer	39 unit	
	f. Warning light	12 unit	
	h. Traffic light	2 unit	
	i. Guadrail	1 paket	
	j. Median	1 paket	
	k. Rambu sungai	30 nit	

2.3 KINERJA PELAYANAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya dalam mewujudkan pemerataan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Retribusi Jasa Usaha



- Retribusi Jasa Terminal
- Retribusi Jasa Kepelabuhan

Dalam periode pembangunan lima tahun sebelumnya, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mencapai target layanan yang direncanakan, beberapa diantaranya justru melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih ada beberapa target pelayanan yang belum dapat dipenuhi dengan tuntas, dikarenakan beberapa kendala yang dialami, baik kendala yang berkaitan dengan keterbatasan SDM, sarana pendukung kerja, maupun kendala yang berasal dari pihak luar, termasuk dari masyarakat.

Rekapitulasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel Laporan Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut (**Tabel 2.3**) :

TABEL 2.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017-2021

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
ASPEK PELAYANAN UMUM																			
Fokus Layanan Urusan Wajib																			
7	PERHUBUNGAN																		
7.1	Persentase peningkatan Retribusi Pada Sektor Terminal	%	100		Rp 70.000,000	Rp 80.000,000	Rp 80.000,000	Rp 80.000,000	Rp 80.000,000	Rp 72,254,000	Rp 84,400,000	Rp 102,561,000			96.9%	94.8%	78.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
7.2	Persentase peningkatan Retribusi Pada Sektor Kepelabuhan	%	100		Rp 70.000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 125,926,500	Rp 130,229,000	Rp 233,489,600			55.6%	76.8%	42.8%	#DIV/0!	#DIV/0!
7.3	Persentase Peningkatan Retribusi Pada Sektor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	%	100		Rp 165.000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 161,881,000	Rp 141,906,000	Rp 207,401,000			101.9%	105.7%	72.3%	#DIV/0!	#DIV/0!
7.4	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	Kasus	60		40	30	20	10	10	54	67	34			74.1%	44.8%	58.8%	#DIV/0!	#DIV/0!
7.5	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Laut	Kasus	3		5	5	3	3	2	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7.6	Persentase Kendaraan Yang Memenuhi Standar Laik Jalan	Unit	2400		1170	1188	1210	1300				1100			#DIV/0!	#DIV/0!	110.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
RPJMD BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN																			
1	Tersedianya Jumlah pelabuhan laut/LLASDP dan terminal bus	Unit	5		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0					
2	Tersedianya Halte dan Dermaga Sungai Kondisi Baik	Unit	13		3	4	3	3	3	3	3	3	3	3					
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN																			
1. PELAYANAN ANGKUTAN JALAN																			
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan																			
	1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	75		75	75	75	75	75	98	98	98	98	98					
	2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	60	95	95	95	95	95					
b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan																			
	1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	100		100	100	100	100	100	98	98	98	98	98					

	2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	40		40	40	40	40	40	40	38	38	38	38	38				
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
c. Fasilitas Perlengkapan Jalan																			
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	60	60	57.8	57.4	57.8	57.8	57.3				
d. Pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor																			
	1) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	%	60		60	60	60	60	60	60	27.8	20.4	21.8	27.8	25.3				
e. Sumber Daya Manusia (SDM)																			
	1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	%	50		50	50	50	50	50	50	10	10	10	20	25				
	2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	%	100		100	100	100	100	100	100	10	10	10	20	25				
	3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	%	40		40	40	40	40	40	40	5	5	5	5	5				
	4) Tersedianya Sumber DayaManusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	%	100		100	100	100	100	100	100	10	11	12	12	12				
f. Keselamatan																			
	1) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	100	100	96.7	97.7	98	98.1	98.1				
2. PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU																			
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau																			

	1) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	76		76	76	76	76	76	76	50	50	70	75	75				
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
	2) Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	40		40	40	40	40	40	40	47	47	47	48	48				
b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau																			
	1) Tersedianya pelabuhan sungai dandanau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	%	60		60	60	60	60	60	60	50	50	50	50	50				
c. Keselamatan																			
	2) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	100	100	98	98.7	98.7	98.7	98.7				
d. Sumber Daya Manusia																			
	3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	%	50		50	50	50	50	50	50	47	48	48.5	48.5	49				
3. PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN																			
a. Jaringan Pelayanan Angkutan																			
	1) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	60	60	58	58	58	58	58				

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	%	100		100	100	100	100	100	98	98	98	98	98					
	2) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.																		
b. Tersedianya Prasarana Angkutan Penyeberangan																			
	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	%	60		60	60	60	60	60	50	50	50	50	50					
c. Keselamatan																			
	1). Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	100	87	87	89	90	97					
d. Sumber Daya Manusia																			
	2). Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	%	50		50	50	50	50	50	46	48	48.5	48.5	49					
4. PELAYANAN ANGKUTAN LAUT																			
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut																			
	1). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	90		90	90	90	90	90	88	88	88	89	89					

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2.																		
	2). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	100		100	100	100	100	100	98	98	98	98	98					
b. Jaringan Pelayanan Prasarana Angkutan Laut																			
	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	60		60	60	60	60	60	65	65	65	65	65					
c. Keselamatan																			
	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	100	97	97	97	97	97					
c. Sumber Daya Manusia (SDM)																			
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	%	100		100	100	100	100	100	97	97	97	97	97					



 Kepala Dinas Perhubungan
 Tanjung Jabung Barat
SYAMSUL HAHARI, S.Sos
 NIP. 1970121319920031001



Secara umum pencapaian target dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan realisasi relatif mempunyai nilai yang baik sesuai target yang telah ditetapkan. Penilai tertinggi kinerja berada di tahun ke-5, dimana pada tahun tersebut diindikasikan dalam perolehan nilai SAKIP dan LPPD. Nilai sakiip Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kategori B dan begitu juga LPPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan meliputi penerimaan pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Secara umum trend penerimaan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Prosentase tertinggi pada penerimaan pendapatan asli daerah terjadi pada tahun ke-4 yaitu 110,9. Namun demikian rata-rata pertumbuhan anggaran terhadap realisasi mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan adanya retribusi yang diberhentikan sementara waktu karena belum ada kejelasan peraturan daerah yang mengatur retribusi tersebut. Hal tersebut terjadi pada tahun ke-4 dan ke-5. Dan pada tahun ke-5 terjadi pengalihan kewenangan pengelolaan terminal Tipe C Pembengis oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga potensi pendapatan pada retribusi terminal berkurang cukup signifikan, dari tahun sebelumnya penerimaan retribusi terminal sebesar Rp.404.335.000,- menjadi Rp. 465.611.200,-. Konsekuensi logis berpengaruh terhadap rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada kurun waktu 2016-2021 .

Selanjutnya di sektor belanja langsung rasio dari tahun ke tahun relatif baik berada di atas, 94%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai perencanaan.



2.3 TANTANGAN DAN PELUANG SKPD

2.3.1 Analisis SWOT

a. STRENGTHS (KEKUATAN):

1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
3. Regulasi yang mendukung.

b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):

1. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas;
2. Belum seimbang nya kapasitas jalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun;
3. Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan dan menyebabkan kemacetan;
4. Trotoar jalan masih digunakan oleh pedagang kaki lima sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas ;
5. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas;
6. Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal;
7. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;



8. Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai;
 9. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka da guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
 10. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
- c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :
1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
 2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.
 3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
 5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.
- d. THREATS (ANCAMAN):



1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupatenn Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3.1 INDETIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya di jaman modern ini sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya, dan itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan ekonomi, pengetahuan dan informasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi permasalahan kesekretariatan dan permasalahan yang ada di bidang atau yang menjadi urusan wajib perhubungan.

1. Permasalahan di kesekretariatan

Permasalahan yang ada di lingkup ini adalah keterbatasan pegawai yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan keterbatasan peralatan kerja. Hal ini



sangat diperlukan guna akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kualitas kerja yang diharapkan.

2. Permasalahan Pada Bidang

Permasalahan yang ada pada bidang atau permasalahan yang terkait pada urusan wajib perhubungan meliputi beberap aspek diantaranya sebagai berikut :

a. Aspek Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Identifikasi dilakukan terhadap gambaran pelayanan dan kinerja dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.

b. Aspek Kajian terhadap RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

c. Aspek Kajian terhadap pola tata ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat/RTRW

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam tiga tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan



Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

d. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS

Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang, analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarang dibandingkan dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan, faktor yang mempengaruhi dan permasalahan yang ada dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda, Prasarana	1. Kemacetan 2. Kesadaran Masyarakat
Kajian terhadap RPJMD	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda	MRL Pusat Kota
Kajian terhadap RTRW	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda, Prasarana yang ada	1. Jaringan Trayek 2. Fasilitas Lalin
Kajian KHLS	Baik	Capaian Renstra	SDM	Peraturan Perundangan	Polusi Udara



3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI (PM)

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2021 – 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025 dan berdasarkan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2024 :

“MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Berkualitas, Sumberdaya manusia berdayasaing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

Ekonomi maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Religius, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

Kompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.



Aman, suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya aman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Harmonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

5.1. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum



di bidang perhubungan untuk terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan secara merata dan berkelanjutan.

Faktor – faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya :

1. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
2. Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan.
3. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas sehingga sebagian besar kecelakaan terjadi karena faktor kelalaian pengemudi.
4. Masih adanya akasi – aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagiankecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu – rambu lalu lintas sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan di jalan.

Adapun faktor – faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Adanya diklat, bimtek peningkatan kapasitas SDM aparatur perhubungan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, sehingga menjadikan sebuah harapan untuk peningkatan kompetensi SDMperhubungan.
2. Adanya dorongan dari pemerintah pusat dan propinsi serta keikutsertaan /lembaga/instansi non pemerintah yang berpartisipasi dan turut serta dalam pemenuhan prasarana



kelengkapan jalan, yang sangat membantu dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.3 TELAAHAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.” Sedangkan misi :

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional;
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah : “Terwujudnya Jambi Tuntas 2021 melalui penyelenggaraan sistem transportasi yang andal dan memiliki daya saing dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional dalam rangka menunjang perekonomian daerah.” Sedangkan misi adalah :



1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Transportasi yang memiliki daya saing dan terpadu didukung oleh sistem perencanaan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pengembangan transportasi massal dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Transportasi yang Efisien dan Efektif dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, selamat dan terjangkau.
4. Memperluas jaringan pelayanan dan penyediaan akses Transportasi untuk mendukung Distribusi Barang/Jasa melalui pengembangan transportasi multi moda.
5. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja kelembagaan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten, berkualitas, profesional dan menguasai teknologi.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLH memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;



3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Identifikasi KLHS Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat (Nama Program yang memberikan dampak lingkungan)	Permasalahan Dinas Perhubungan kabupaten Tanjung Jabung Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program Pelayanan Lalu Lintas	Masih adanya ruas jalan yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan	Masih adanya ruas jalan yang dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas	Forum Lalu Lintas dan Angkuta Jalan: Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2	Program Pelayanan Angkutan	Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji emisi gas buang	Masih rendahnya kepedulian pemilik/awak angkutan umum terhadap dampak emisi gas buang kendaraan	Ketersediaan gedung dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (uji emisi gas buang)



3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa lima



tahun mendatang. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
3. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
4. Masih adanya kawasan yang belum terlayannya trayek angkutan kota;
5. Masih rendahnya pengawasan pengendalian angkutan umum AKAP/AKDP yang melintasi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Keterbatasan jumlah terminal tipe c;
7. Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik;
8. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji;
9. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berbagai isu strategis tersebut, bila dianalisis dan ditelaah lebih lanjut mengerucut pada 2 isu strategis utama yakni :

1. Kesenjangan yang makin besar antara perkembangan kebutuhan dan aktivitas masyarakat Kota Tasikmalaya dengan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang tersedia;
2. Manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas belum optimal.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Keterkaitan tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam **Tabel 4.1**



Tabel 4.1
VISI, MISI TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan.	Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembegis	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	Meningkat hingga sampai akhir priode 3%
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1%	1%	1%	1%	1%	1%	Meningkat hingga sampai akhir priode 6%
		Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhanan	1%	1%	1%	5%	7%	10%	Meningkat hingga sampai akhir priode 25%
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	50 Kasus	40	30	20	10	5	5 Kasus
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	5 Kasus	4	3	3	3	2	2 Kasus



Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1154 Unit (85,4%)	1.170 Unit (86,6%)	1.188 Unit (88%)	1.210 Unit (89,6%)	1.300 Unit (96,2%)	1.350 Unit (100%)	1.350 Unit (100%)
Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	70	70	78	80	80	85	85 (A)
		Nilai AKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
		Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan	0	0	0	0	0	0 Temuan



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara suatu organisasi mencapai tujuan. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja organisasi dalam artian dapat menjadi instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun strategi dan arah kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2016 – 2021 dapat diformulasikan melalui relevansi terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagai berikut :

5.1.1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta



Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.

2. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.
4. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala
5. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayah Pembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.
5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas



Visi & Misi RPJMD

Visi RPJMD	“Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”
Misi RPJMD :	
Misi 1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
Misi 2	Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
Misi 3	Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
Misi 4	Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Misi 5	Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 5 RPJMD yaitu Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota. Dengan Tujuan 5.1 yaitu Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota/kabupaten. Dan Sasaran 5.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan.



TABEL 5.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026

Visi RPJMD : Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

MISI RPJMD

➤ **Misi 5 : Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa Samapi Ke Kota**

Tujuan 5.1 : Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota

Sasaran 5.1.2 : Menguatnya Konektivitas dari Desa Sampai Kota dan Daerah Perbatasan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Capaian Tujuan & Sasaran				
				strategi	Arah kebijakan	Programm		
1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan.	1	Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Terminal Pembengis	1	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayah Pembinaan, pengawasan dan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
			2	Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	2			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas



			3	Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor kepelabuhan	3	pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.	penertiban angkutan jalan.	Perhubungan
		Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Transportasi Darat dan Laut.	1	Jumlah Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk	Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.	Programeningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
			2	Jumlah Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	2	menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2	Meningkatkan keselamatan dan	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan	1	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1	Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan	Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi	Program Peningkatan



	kenyamanan pengguna jasa transportasi	Angkutan Umum			bermotor secara berkala	sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.	Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
3	Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	1	Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



			2	Nilai AKIP	2	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi dan informasi.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
			3	Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	3	Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.	Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Fokus Sasaran Dinas Perhubungan Berkaitan dengan Renstra Kementerian Perhubungan :

- **Sasaran Kegiatan Perhubungan : Peningkatan Konektivitas dan Akseibilitas**
Indikator/tolak ukur : Jumlah Perencanaan Dokumen Halte Sungai
- **Sasaran Kegiatan Perhubungan : Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi**
Indikator/tolak ukur : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Halte Sungai
- **Sasaran Kegiatan Perhubungan : Peningkatan Keselamatan dan Keamanan**
Indikator/tolak ukur : Penyediaan Rambu Rambu dan Penegakan Gakum



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2016-2021 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 9 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2022-2025 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 9 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2022 -2025 adalah sebagai berikut:

A. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :



- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :



- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
- b. Pembangunan Gedung Terminal



- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
- g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian erkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota



Sub Kegiatan :

- a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
- b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



- b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan

11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

12. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN



1. **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota



3. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota



- c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota

5. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

6. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau



- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

7. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
- b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

8. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

9. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :



- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

10. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

11. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

12. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :



- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

18.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya.

18.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

18.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan indikatif dalam rangka pembiayaan program-program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada matrik dibawah ini :



Tabel 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
Dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)

Tabel T. C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
S.1 Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota/ S.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sempai kota dan daerah perbatasan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	%	0	100%	Rp 5,230,100,104	100%	Rp 5,824,615,104	100%	Rp 6,446,479,123	100%	Rp 5,453,694,201.30	100	Rp 5,849,943,094	100%	Rp 5,968,393,222.96	100%	Rp 34,773,224,849	Dishub	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	17	100%	Rp 60,000,000	16	Rp 57,000,000	16	Rp 57,000,000	16	Rp 57,000,000	16	Rp 57,000,000	16	Rp 57,000,000	8100%	Rp 345,000,000	Dishub	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Diausun	Dokumen	5	5	Rp 15,000,000	4	Rp 12,000,000	4	Rp 12,000,000	4	Rp 12,000,000	4	Rp 12,000,000	4	Rp 12,000,000	25	Rp 75,000,000	Dishub	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen/Sosialisasi	1	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	6	Rp 30,000,000	Dishub	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 30,000,000	Dishub	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	6	Rp 30,000,000	Dishub	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	1	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	6	Rp 30,000,000	Dishub	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	3	3	Rp 15,000,000	3	Rp 15,000,000	3	Rp 15,000,000	3	Rp 15,000,000	3	Rp 15,000,000	3	Rp 15,000,000	18	Rp 90,000,000	Dishub	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5	5	Rp 10,000,000	5	Rp 10,000,000	5	Rp 10,000,000	5	Rp 10,000,000	5	Rp 10,000,000	5	Rp 10,000,000	30	Rp 60,000,000	Dishub	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD	Laporan	0	100%	Rp 3,431,439,669	100%	Rp 3,431,439,669	100%	Rp 3,431,439,669	100%	Rp 4,099,436,802.80	100%	Rp 4,440,624,870	100%	Rp 4,508,862,483.08	100%	Rp 23,343,243,163	Dishub	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Bulan	12	12	Rp 3,268,090,669	12	Rp 3,268,090,669	12	Rp 3,268,090,669	12	Rp 3,921,708,802.80	12	Rp 4,248,517,870	12	Rp 4,313,879,683.08	72	Rp 22,288,378,363	Dishub	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium	Bulan	12	12	Rp 158,349,000	12	Rp 158,349,000	12	Rp 158,349,000	12	Rp 172,728,000.00	12	Rp 187,107,000	12	Rp 189,982,800.00	72	Rp 1,024,864,800	Dishub	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	6	Rp 30,000,000	Dishub	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris	%	0	100%	Rp 110,000,000	100%	Rp 160,000,000	100%	Rp 210,000,000	100%	Rp 260,000,000.00	100%	Rp 310,000,000	100%	Rp 360,000,000.00	100%	Rp 1,410,000,000	Dishub	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang BMD OPD	Dokumen	1	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	6	Rp 30,000,000	Dishub	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah OPD yang di amankan	Unit	8	8	Rp 100,000,000	8	Rp 150,000,000	8	Rp 200,000,000	8	Rp 250,000,000.00	8	Rp 300,000,000	8	Rp 350,000,000.00	48	Rp 1,350,000,000	Dishub	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD OPD	Dokumen	1	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	100%	Rp 30,000,000	Dishub	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	125	134	Rp 130,000,000	134	Rp 130,000,000	134	Rp 130,000,000	134	Rp 130,000,000.00	134	Rp 130,000,000	134	Rp 130,000,000.00	804	Rp 780,000,000	Dishub	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Stel	125	132	Rp 70,000,000	132	Rp 70,000,000	132	Rp 70,000,000	132	Rp 70,000,000.00	132	Rp 70,000,000	132	Rp 70,000,000.00	792	Rp 420,000,000	Dishub	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Orang	0	2	Rp 60,000,000	2	Rp 60,000,000	2	Rp 60,000,000	2	Rp 60,000,000.00	2	Rp 60,000,000	2	Rp 60,000,000.00	12	Rp 360,000,000	Dishub	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	100%	Rp 393,160,434	100%	Rp 455,675,434	100%	Rp 451,129,110	100%	Rp 431,582,785.40	100%	Rp 431,129,110	100%	Rp 431,809,623.30	100%	Rp 2,594,486,496	Dishub	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan penerangan kantor	Bulan	12	12	Rp 4,990,434	12	Rp 4,990,434	12	Rp 5,444,110	12	Rp 5,897,785.40	12	Rp 5,444,110	12	Rp 6,124,623.30	72	Rp 32,891,496	Dishub
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	7	0	Rp -	17	Rp 75,000,000	16	Rp 70,000,000	6	Rp 50,000,000.00	6	Rp 50,000,000	6	Rp 50,000,000.00	51	Rp 295,000,000	Dishub
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Bulan	12	12	Rp 25,000,000	12	Rp 25,000,000	12	Rp 25,000,000	12	Rp 25,000,000.00	12	Rp 25,000,000	12	Rp 25,000,000.00	72	Rp 150,000,000	Dishub
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Bulan	12	12	Rp 25,000,000	12	Rp 25,000,000	12	Rp 25,000,000	12	Rp 25,000,000.00	12	Rp 25,000,000	12	Rp 25,000,000.00	72	Rp 150,000,000	Dishub
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak (balgko atau formulir / atau xerox) dan penggandaan	Bulan	12	12	Rp 19,085,000	12	Rp 19,085,000	12	Rp 19,085,000	12	Rp 19,085,000.00	12	Rp 19,085,000	12	Rp 19,085,000.00	72	Rp 114,510,000	Dishub
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	Rp 19,085,000	12	Rp 6,600,000	12	Rp 6,600,000	12	Rp 6,600,000.00	12	Rp 6,600,000	12	Rp 6,600,000.00	72	Rp 52,085,000	Dishub
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12	Rp 300,000,000	12	Rp 300,000,000	12	Rp 300,000,000	12	Rp 300,000,000.00	12	Rp 300,000,000	12	Rp 300,000,000.00	72	Rp 1,800,000,000	Dishub
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang Tersedia	Unit	0	24	Rp 275,000,000	28	Rp 405,000,000	27	Rp 925,000,000	26	Rp 325,000,000.00	26	Rp 325,000,000	26	Rp 325,000,000.00	157	Rp 2,580,000,000	Dishub
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua	Unit	0	0	Rp -	2	Rp 50,000,000	2	Rp 50,000,000	2	Rp 50,000,000	2	Rp 50,000,000	2	Rp 50,000,000	10	Rp 250,000,000	Dishub
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua	Unit	0	0	Rp -	2	Rp 80,000,000	1	Rp 600,000,000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 680,000,000	Dishub
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Unit	0	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	60	Rp 300,000,000	Dishub
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan / mesin atau (nama alat / mesin)	Unit	0	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	6	Rp 300,000,000	Dishub
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana / prasarana gedung kantor / (nama sarana / prasarana)	Unit	0	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	60	Rp 600,000,000	Dishub
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana / prasarana pendukung gedung kantor / (nama sarana / prasarana)	Unit	0	3	Rp 75,000,000	3	Rp 75,000,000	3	Rp 75,000,000	3	Rp 75,000,000	3	Rp 75,000,000	3	Rp 75,000,000	18	Rp 450,000,000	Dishub
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	Bulan	12	12	Rp 114,808,781	12	Rp 114,808,781	12	Rp 125,238,104	12	Rp 135,674,613.10	12	Rp 141,189,115	12	Rp 140,721,116.58	72	Rp 772,440,511	Dishub
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terkelola	Bulan	12	12	Rp 1,316,185	12	Rp 1,316,185	12	Rp 1,428,000	12	Rp 1,547,000.00	12	Rp 4,998,000	12	Rp 1,606,500.00	72	Rp 12,211,870	Dishub
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah hitungan beban telepon / air / listrik yang terpakai, atau jumlah hitungan gupiah yang dibayarkan	Bulan	12	12	Rp 94,600,000	12	Rp 94,600,000	12	Rp 103,200,000	12	Rp 111,800,000.00	12	Rp 113,520,000	12	Rp 116,100,000.00	72	Rp 633,820,000	Dishub
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor	Bulan	12	12	Rp 18,892,596	12	Rp 18,892,596	12	Rp 20,610,104	12	Rp 22,327,613.10	12	Rp 22,671,115	12	Rp 23,014,616.58	72	Rp 126,408,640	Dishub
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik	Unit	93	88	Rp 715,691,220	95	Rp 1,070,691,220	95	Rp 1,116,672,240	95	Rp 15,000,000.00	95	Rp 15,000,000.00	95	Rp 15,000,000.00	563	Rp 2,948,054,680	Dishub

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab								
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD										
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	0	2	Rp	200,000,000	2	Rp	200,000,000	2	Rp	200,000,000	2	Rp	200,000,000	2	Rp	200,000,000	12	Rp	1,200,000,000	Diahub				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	32	32	Rp	487,025,000	32	Rp	487,025,000	32	Rp	531,300,000	32	Rp	575,575,000.00	32	Rp	584,430,000	32	Rp	584,430,000.00	192	Rp	3,249,785,000	Diahub	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya / (seksi)	Unit	54	54	Rp	28,666,220	54	Rp	28,666,220	54	Rp	30,372,240	54	Rp	32,903,260.00	54	Rp	33,409,464	54	Rp	33,409,464.00	324	Rp	187,426,868	Rp	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana / prasarana gedung kantor	Unit	7	0	Rp	-	7	Rp	355,000,000	7	Rp	355,000,000	7	Rp	355,000,000	7	Rp	355,000,000	7	Rp	355,000,000	35	Rp	1,775,000,000	Diahub	
S.1 Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota / S.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan			PROGRAM PENWLENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	%	0	100%	Rp	814,180,000	100%	Rp	3,162,000,000	100%	Rp	2,825,000,000	100%	Rp	1,855,000,000	100%	Rp	2,950,000,015	100%	Rp	2,705,000,000	100%	Rp	14,311,180,015		
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	200,000,000	1	Rp	500,000,000	2	Rp	50,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	2	Rp	750,000,000	Diahub	
		Sasaran S.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Dokumen	0	0	Rp	-	1	Rp	200,000,000	1	Rp	500,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	700,000,000	Diahub
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen yang dilegalisasi/Jumlah sosialisasi	Dokumen/Sosialisasi	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	2	Rp	50,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	50,000,000	Diahub
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	0	25	Rp	50,000,000	50	Rp	185,000,000	55	Rp	185,000,000	80	Rp	250,000,000	45	Rp	135,000,000	45	Rp	185,000,000	300	Rp	990,000,000	Diahub
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terpenuhi	Unit	0	25	Rp	50,000,000	30	Rp	100,000,000	35	Rp	150,000,000	50	Rp	200,000,000	25	Rp	100,000,000	25	Rp	150,000,000	190	Rp	750,000,000	Diahub
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan dalam kondisi baik	Unit	0	0	Rp	-	20	Rp	35,000,000	20	Rp	35,000,000	30	Rp	50,000,000	20	Rp	35,000,000	20	Rp	35,000,000	110	Rp	190,000,000	Diahub
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Perantasa Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	0	100%	Rp	-	100%	Rp	40,000,000	100%	Rp	50,000,000	100%	Rp	115,000,000	100%	Rp	1,500,000,000	100%	Rp	1,000,000,000	1	Rp	2,705,000,000	Diahub	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Perencanaan Yan Tersusun	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	50,000,000	1	Rp	75,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	2	Rp	125,000,000	Diahub	
			Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Terminal	Unit	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	1,500,000,000	1	Rp	1,000,000,000	2	Rp	2,500,000,000	Diahub	
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di bangun	Unit	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	-	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Diahub	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	Unit	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	-	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Diahub	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab							
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Petugas Aparatur yang mengikuti diklat struktural	Orang	0	0	Rp	-	4	Rp	40,000,000	0	Rp	-	4	Rp	40,000,000	-	4	Rp	40,000,000	12	Rp	120,000,000	Dishub		
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	Dokumen	0	0	Rp	-	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	100%	Rp	10,000,000	100%	Rp	-	100%	Rp	40,000,000	Dishub
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Rekomendasi Parkir	Dokumen	0	-	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi	Dokumen	0	0	Rp	-	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	4	Rp	40,000,000	Dishub
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peersentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	0	0%	Rp	-	100%	Rp	1,760,000,000	100%	Rp	1,020,000,000	100%	Rp	220,000,000	100	Rp	245,000,000	100%	Rp	400,000,000	100%	Rp	3,645,000,000	Dishub
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Unit	0	0	Rp	-	2	Rp	1,750,000,000	1	Rp	750,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	400,000,000	4	Rp	2,900,000,000	Dishub
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	Orang	0	0	Rp	-	0	Rp	-	2	Rp	40,000,000	2	Rp	40,000,000	2	Rp	40,000,000	0	Rp	-	6	Rp	120,000,000	Dishub
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang wajib uji	Unit	0	0	Rp	-	1000	Rp	10,000,000	1000	Rp	10,000,000	1000	Rp	10,000,000	1000	Rp	10,000,000	1000	Rp	10,000,000	5000	Rp	50,000,000	Dishub
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	Unit	0	0	Rp	-	0	Rp	-	1000	Rp	75,000,000	1000	Rp	50,000,000	1000	Rp	50,000,000	1000	Rp	50,000,000	4000	Rp	225,000,000	Dishub
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sosialisasi	Sosialisasi	0	0	Rp	-	0	Rp	-	2	Rp	20,000,000	2	Rp	20,000,000	2	Rp	20,000,000	2	Rp	20,000,000	8	Rp	80,000,000	Dishub
			Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Dokumen Analisis Potensi Kendaraan Yang Wajib Uji	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	25,000,000	0	Rp	-	1	Rp	25,000,000	0	Rp	-	2	Rp	50,000,000	Dishub
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Unit	0	0	Rp	-	-	Rp	-	8	Rp	100,000,000	8	Rp	100,000,000	8	Rp	100,000,000	8	Rp	100,000,000	32	Rp	400,000,000	Dishub
		Sasaran 5.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	%	0	100%	Rp	589,180,000	100%	Rp	717,000,000	100%	Rp	795,000,000	100%	Rp	795,000,000	100%	Rp	795,000,000	100%	Rp	795,000,000	100%	Rp	4,486,180,000	Dishub
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan rekayasa lalu lintas	Laporan	0	0	Rp	-	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	5	Rp	75,000,000	Dishub

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian	Kali	20	20	Rp 589,180,000	36	Rp 672,000,000	36	Rp 750,000,000	200	Rp 4,261,180,000	Dishub							
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Rapat Pembahasan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kali	4	0	Rp -	3	Rp 30,000,000	15	Rp 150,000,000	Dishub									
			Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp -	100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 75,000,000	100%	Rp 135,000,000	Dishub							
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Dokumen Andalalin	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 50,000,000	4	Rp 50,000,000	Dishub	
			Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	Orang	0	0	Rp -	1	Rp 15,000,000	5	Rp 75,000,000	Dishub									
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Dokumen Andalalin	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10,000,000	1	Rp 10,000,000	Dishub	
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Rekomendasi Yang di Keuarkan	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Dishub	
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi	Razia/operasi gabungan	0	0	Rp -	2	Rp 50,000,000	10	Rp 250,000,000	Dishub									
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi Gabungan	Razia/operasi gabungan	0	0	Rp -	2	Rp 50,000,000	2	Rp 50,000,000	2	Rp 75,000,000	2	Rp 75,000,000	2	Rp 75,000,000	10	Rp 325,000,000	Dishub	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp 175,000,000	100%	Rp 1,455,000,030	Dishub											
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Kendaraan Angkutan Umum antar Kota dalam Kabupaten	Unit	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Dishub	
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pengendalian Angkutan Umum	Operasi	6	5	Rp 175,000,000	5	Rp 175,000,000	5	Rp 175,000,000	5	Rp 175,000,000	5	Rp 175,000,000	5	Rp 175,000,000	30	Rp 1,050,000,000	Dishub	
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp 150,000,000	100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 255,000,030	Dishub	
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Trayek Angkutan	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 150,000,000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 150,000,000	Dishub	
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi trayek angkutan	Sosialisasi	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 15,000,000	1	Rp 15,000,000	2	Rp 30,000,000	Dishub	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab						
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	15,000,000	100%	Rp	15,000,000	100%	Rp	15	100%	Rp	-	100%	Rp	30,000,015	Dishub
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp	-	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15	0	Rp	-	4	Rp	45,000,015	Dishub
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	0	Rp	-	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	0	Rp	10,000,000	0	Rp	10,000,000	3	Rp	50,000,000	Rp
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif	Dokumen	0	0	Rp	-	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	5	Rp	50,000,000	Dishub
		Sasaran 5.1.2 Menguatya	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	%	0	0	Rp	553,980,000	100%	Rp	1,800,300,000	100%	Rp	6,617,500,000	100%	Rp	5,305,000,000	100%	Rp	3,890,000,000	100%	Rp	3,865,000,000	100%	Rp	22,031,780,000	Dishub
		konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	0	0	Rp	-	100%	Rp	15,000,000	100%	Rp	15,000,000	100%	Rp	15,000,000	100%	Rp	15,000,000	100%	Rp	15,000,000	100%	Rp	75,000,000	Dishub
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Yang di Keluarkan	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	0	0	Rp	-	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	5	Rp	75,000,000	Dishub

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Uit Kerja SKPD Penanggung Jawab						
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp	-	100%	Rp	15,000,000	100%	Rp	15,000,000	100%	Rp	15,000,000	100%	Rp	15,000,000	100%	Rp	75,000,000	Dishub			
			Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Yang di Keluarkan	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	0	0	Rp	-	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	5	Rp	75,000,000	Dishub
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	%	0	100%	Rp	553,980,000	100%	Rp	835,300,000	100%	Rp	860,000,000	100%	Rp	860,000,000	100%	Rp	860,000,000	100%	Rp	4,829,280,000	Dishub			
			Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	0	0	Rp	-	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	5	Rp	50,000,000	Dishub
			Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi/penerbitan	Operasional	12	12	Rp	553,980,000	12	Rp	825,300,000	12	Rp	850,000,000	12	Rp	850,000,000	12	Rp	850,000,000	12	Rp	850,000,000	72	Rp	4,779,280,000	Dishub

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Uit Kerja SKPD Penanggung Jawab												
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp														
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													
			Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp	-	100%	Rp	25,000,000	100%	Rp	22,500,000	100%	Rp	10,000,000	100%	Rp	10,000,000	100%	Rp	10,000,000	100%	Rp	10,000,000	100%	Rp	77,500,000	Dishub			
			Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tarif Pelabuhan Penyeberangan	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	12,500,000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	12,500,000	Dishub
			Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	0	0	Rp	-	1	Rp	15,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	15,000,000	Dishub
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	jumlah operasi pelabuhan	Operasional	0	0	Rp	-	3	Rp	10,000,000	3	Rp	10,000,000	3	Rp	10,000,000	3	Rp	10,000,000	3	Rp	10,000,000	3	Rp	10,000,000	3	Rp	10,000,000	15	Rp	50,000,000	Dishub
			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	%	0	0	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	300,000,000	100%	Rp	1,500,000,000	100%	Rp	35,000,000	100%	Rp	10,000,000	100%	Rp	10,000,000	100%	Rp	1,845,000,000	Dishub			
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Kajian Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	300,000,000	1	Rp	1,500,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	2	Rp	1,800,000,000	Dishub
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Legalisasi dokumen/sosialisasi	Dokumen			Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	25,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	25,000,000	Dishub
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Laporan	Laporan	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	2	Rp	10,000,000	2	Rp	20,000,000	Dishub			
			Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	0	0	Rp	-	100%	Rp	700,000,000	100%	Rp	185,000,000	100%	Rp	185,000,000	100%	Rp	185,000,000	100%	Rp	185,000,000	100%	Rp	185,000,000	100%	Rp	1,440,000,000	Dishub			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab					
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen rencana induk DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau Serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Halte Sungai	Dokumen	0	0	Rp	-	4	Rp	700,000,000	3	Rp	150,000,000	3	Rp	150,000,000	3	Rp	150,000,000	16	Rp	1,300,000,000	Dishub			
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Legalisasi dokumen/sosialisasi	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	2	Rp	25,000,000	2	Rp	25,000,000	2	Rp	25,000,000	2	Rp	25,000,000	8	Rp	100,000,000	Dishub
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah laporan	Laporan	0	0		0	Rp	-	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	4	Rp	40,000,000	Dishub	
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	%	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Rekomendasi Yang di Keluarkan	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Pelabuhan	Pelabuhan	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpuan Lokal	jumlah laporan	Laporan	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Operasi	Operasional	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian dan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	0	0	Rp	-	0	Rp	150,000,000	100%	Rp	5,160,000,000	100%	Rp	2,660,000,000	100%	Rp	2,710,000,000	100%	Rp	2,710,000,000	100%	Rp	13,390,000,000	Dishub
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Rekomendasi Yang di Keluarkan	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan/Halte	Unit	0	0	Rp	-	0	Rp	-	2	Rp	5,000,000,000	1	Rp	2,500,000,000	1	Rp	2,500,000,000	1	Rp	2,500,000,000	5	Rp	12,500,000,000	Dishub
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau dalam kondisi baik	Unit	0	0	Rp	-	3	Rp	150,000,000	3	Rp	150,000,000	3	Rp	150,000,000	4	Rp	200,000,000	4	Rp	200,000,000	17	Rp	850,000,000	Dishub
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah dokumen operasional	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	1	Rp	10,000,000	4	Rp	40,000,000	Dishub
			Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal	%	0	0	Rp	-	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	5	Rp	75,000,000	Dishub

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab				
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan	Laporan	0	0	Rp	-	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	1	Rp	15,000,000	5	Rp	75,000,000	Dishub
JUMLAH TOTAL																									

Kuala Tungkal, Februari 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2021-2026 tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD

7.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021 – 2026 yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- Tujuan RPJMD : 5.1. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota/.
- Sasaran RPJMD : 5.1.2. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan Daerah perbatasan
- Strategi RPJMD : 1. Pembangunan dan peningkatan jaringan transportasi, terminal, dan pelabuhan, serta Pelabuhan Sungai dan Danau (Halte Sungai)
- Arah Kebijakan : 1. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
2. Peningkatan aktivitas perekonomian yang merata dari desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan

7.2. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, berikut ini indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung

RENSTRA (2021-2026)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Barat 2021-2026, tersusun dalam tabel sebagai berikut :Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada RPJMD

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2020)		TARGET KINERJA DAN PROGRAM PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR	
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					Target	Unit	Target	Unit	Target	Unit	Target	Unit	Target	Unit	Target	Unit		
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/ keluar daerah	182160	Unit	192000	Unit	192500	Unit	193000	Unit	193500	Unit	194000	Unit	194500	Unit		
2.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Jumlah angkutan yang terdaftar Uji KIR	251	Unit	980	Unit	1000	Unit	1100	Unit	1200	Unit	1250	Unit	1300	Unit		
3.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	Jumlah lokasi sarana angkutan dengan pelayanan yang nyaman	0	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit		
4.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n $\frac{\text{Jumlah angkutan Umum pada tahun n}}{\text{Jumlah angkutan Umum pada tahun n}} \times 100\%$	80	%	82	%	85	%	89	%	90	%	95	%	98	%		
5.	Pemasangan Rambu-Rambu	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu pada tahun n $\frac{\text{Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia}}{\text{Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	80	%	82	%	85	%	89	%	90	%	95	%	98	%		
6.	jumlah orang/barang yang tersangkut angkutan umum	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	189354	Unit	198000	Unit	199000	Unit	200000	Unit	201000	Unit	202000	Unit	203000	Unit		
7.	jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	Jumlah orang barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	182160	Orang	192000	Orang	193000	Orang	194000	Orang	195000	Orang	196000	Orang	197000	Orang		
		Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	7194	Unit	6100	Unit	6200	Unit	6300	Unit	6400	Unit	6500	Unit	6600	Unit		
8.	V/C Ratio Jalan	Pengukuran Kemacetan Pada Suatu Jalan Tertentu (MKTJ)	0,71		0,72		0,73		0,74		0,75		0,76		0,77			
9.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Arus Lalu Lintas (MKTJ)	1.7		1,8		1,85		1,9		1,95		2		2			



Tabel 7.2

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1154 Unit (85,4%)	1.170 Unit (86,6%)	1.188 Unit (88%)	1.210 Unit (89,6%)	1.300 Unit (96,2%)	1.350 Unit (100%)	1.350 Unit (100%)
2	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut	Jumlah Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	50 Kasus	40	30	20	10	5	5 Kasus
		Jumlah Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	5 Kasus	4	3	3	3	2	2 Kasus
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan	Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembengis	Rp.	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	Rp.
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	1%	1%	1%	1%	1%	Rp.
		Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhan	Rp.	1%	1%	5%	7%	10%	Rp.
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik,	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	70	78	80	80	85	85 (A)

RENSTRA (2021-2026)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	Nilai AKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
	Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan	0	0	0	0	0	0



BAB VIII

PENUTUP

Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yang mengacu pada indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - Tahun 2026, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode 2021 - 2026. dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Dinas Perhubungan. dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Kuala Tungkal, Agustus 2021
Penanggung Jawab
Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001